

**PENGARUH PENGUNGKAPAN ESG, *CAPITAL INTENSITY*, DAN *COMPANY SIZE* TERHADAP *TAX AGGRESSIVENESS* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SRI-KEHATI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2024**

**PROPOSAL**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**MUHAMAD AMIN RASYIDI**

**2101036245**

**AKUNTANSI**

**FAULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pengungkapan ESG, *Capital Intensity*,  
dan *Company Size* Terhadap *Tax Aggressiveness*  
pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Indeks SRI-  
KEHATI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024

Nama Mahasiswa : Muhamad Amin Rasyidi

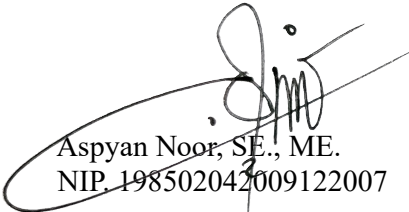
NIM : 2101036245

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1- Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,  
Samarinda, 18 Juni 2025  
Pembimbing,



Aspyan Noor, SE., ME.  
NIP. 198502042009122007

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSP., CIQaR  
NIP. 198502042009122007

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori (Teori Keagenan).....	11
2.2 <i>Tax Aggressiveness</i> .....	12
2.3 Pengungkapan ESG .....	13
2.4 <i>Capital Intensity</i> .....	16
2.5 <i>Company Size</i> .....	17
2.6 Penelitian Terdahulu .....	19
2.7 Kerangka Konseptual.....	22
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	23
2.8.1 Pengaruh Pengungkapan ESG terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> .....	23
2.8.2 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> .....	24
2.8.3 Pengaruh <i>Company Size</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> .....	25
<b>BAB III DEFINISI OPERASIONAL</b> .....	<b>27</b>
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	27
3.1.1 Variabel Dependen (Y).....	27
3.1.2 Variabel Independen (X).....	28
3.2 Populasi dan Sampel.....	31
3.2.1 Populasi .....	31
3.2.2 Sampel .....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5 Analisis Data .....	33
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	33
3.5.2 Model Estimasi Regresi Data Panel .....	34

3.5.3 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	35
3.5.4 Uji Asumsi Klasik .....	36
3.5.5 Uji F.....	39
3.5.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	39
3.5.7 Analisis Regresi Linear Berganda .....	40
3.5.8 Uji Hipotesis (Uji t).....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2022-2024 (Dalam Rupiah).....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Sampel Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Dasar Pengambilan Keputusan Uji <i>Durbin-Watson</i> .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	23
Gambar 2.2 Model Penelitian .....	24

## DAFTAR SINGKATAN

ESG	Environmental Social Governance
CSR	Corporate Social Responsibility
GRI	Global Reporting Initiative
BEI	Bursa Efek Indonesia
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PPh	Pajak Penghasilan
HR	Harmonized System

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan yang semakin meningkat menciptakan perputaran ekonomi yang dinamis, sehingga membuka peluang baru bagi peningkatan pendapatan negara. Untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara optimal, pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta penyediaan layanan publik. Pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengandalkan pajak dalam mengatur perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah mengandalkan pajak sebagai instrumen fiskal utama untuk mengatur perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penerimaan pajak memegang peran yang sangat penting dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana lebih dari 70% kebutuhan belanja negara ditopang oleh sektor perpajakan. Pemerintah mencatat capaian penerimaan pajak yang cukup signifikan, meskipun menghadapi tantangan dari perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika

perekonomian domestik. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2025), hingga akhir tahun 2024 penerimaan pajak selalu meningkat secara nominal dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel penerimaan pajak dari tahun 2022 hingga 2024.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2022-2024 (Dalam Rupiah)**

Keterangan	2022	2023	2024
Penerimaan Pajak	1.716,8 triliun	1.869,23 triliun	1.932,4 triliun
Target Penerimaan Pajak	1.485,1 triliun	1.818,3 triliun	1.988,9 triliun
Penerimaan Per Tahun	115,6 %	102,8 %	97,2 %

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2025

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak tahun 2024 tidak mencapai target walaupun dari sisi nominal tetap meningkat dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 hanya Rp1.932,4 triliun, mencapai 97,2% dari target Rp1.988,9 triliun, menunjukkan adanya shortfall sekitar Rp56,5 triliun. Penurunan harga komoditas global, seperti batu bara dan kelapa sawit, berdampak signifikan pada penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) badan dari sektor pertambangan dan industri pengolahan.

PPh Badan merupakan salah satu jenis pajak yang memegang peranan penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, karena besarnya kontribusi yang berasal dari laba perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, secara otomatis kewajiban pajak mereka pun ikut meningkat, karena PPh Badan dihitung berdasarkan dari laba kena pajak. Beban pajak yang semakin tinggi ini akan dianggap sebagai tekanan finansial yang mengurangi keuntungan bersih suatu perusahaan. Sebagian perusahaan mungkin terdorong untuk meminimalkan beban

pajak dengan bersikap agresif yang biasa disebut sebagai *Tax Aggressiveness*, mencakup upaya legal seperti *tax avoidance* hingga tindakan ilegal seperti *tax evasion*. Perusahaan yang menerapkan strategi agresivitas pajak sering kali memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya, sehingga strategi ini dapat meningkatkan laba perusahaan. Namun, di satu sisi dapat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak dan menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan.

Pada laporan *Tax Justice Network* (2023), menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kerugian sekitar Rp44 triliun akibat dari pengemplangan pajak oleh perusahaan. Kerugian sebesar itu tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial karena beban pajak menjadi tidak merata. Selain itu, praktik tersebut dapat melemahkan kapasitas fiskal pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik *tax aggressiveness* menjadi perhatian akademisi dan praktisi, terutama karena dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan perpajakan. Berbagai faktor telah diidentifikasi dapat menjadi pendorong agresivitas pajak pada perusahaan, baik yang berasal dari aspek internal perusahaan maupun eksternal, termasuk tekanan dari pemangku kepentingan. Salah satu aspek yang belakangan ini mulai mendapat perhatian dalam studi-studi perpajakan adalah komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, yang

tercermin dalam pengungkapan *Environmental, Social, dan Government*. ESG merupakan konsep yang menekankan pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta diharapkan mendorong perusahaan untuk lebih transparan.

Pengungkapan ESG di Indonesia mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius seiring dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sejak 2021, semakin banyak perusahaan di Indonesia yang mulai mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan internasional, seperti *Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021*, untuk memperkuat kredibilitas *ESG disclosure* mereka. Sebagai bentuk pengakuan terhadap perusahaan yang menunjukkan komitmen tinggi dalam aspek keberlanjutan, dikembangkan sebuah indeks khusus yang mengelompokkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Indeks SRI-KEHATI, yang dikelola oleh Yayasan KEHATI dan Bursa Efek Indonesia (BEI), merupakan indeks bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan. Indeks ini mencakup 25 perusahaan yang dipilih, ditinjau, dan diperbarui setiap bulan Mei dan November berdasarkan kinerja mereka dalam mendorong usaha-usaha keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, terdapat perusahaan yang terdaftar dalam indeks ini tetap menunjukkan perilaku agresif dalam strategi perpajakan mereka.

Seharusnya perusahaan yang terdaftar dalam indeks ini diharapkan memiliki tata kelola yang baik, termasuk dalam kepatuhan pajak.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan adanya praktik *tax aggressiveness* pada perusahaan yang memiliki komitmen ESG tinggi adalah dugaan penghindaran pajak oleh PT Antam Tbk. Meskipun perusahaan ini terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI, laporan investigasi menunjukkan bahwa PT Antam Tbk diduga melakukan penghindaran pajak dengan mengubah kode *Harmonized System* (HS) dalam impor emas, sehingga berdampak pada bea masuk yang harus dibayar. Impor emas senilai Rp 47,1 triliun dikenai bea impor sebesar 5 persen dan PPh impor sebesar 2,5 persen, Bea Cukai seharusnya memperoleh bea impor sebesar Rp 2,35 triliun dari bea impor dan Rp 597 miliar dari PPh (Tempo, 2024). Praktik tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki komitmen terhadap ESG, strategi perencanaan pajak yang agresif masih dapat diterapkan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pengungkapan ESG benar-benar dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan atau justru digunakan sebagai alat legitimasi untuk menyembunyikan strategi pajak yang agresif.

Pengungkapan ESG, yang mencakup penerapan aktivitas CSR sebagai bagian dari aspek sosial, sering dipandang sebagai cerminan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan etika bisnis. Meski diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas, pada praktiknya tidak dapat diketahui apakah semua perusahaan dengan pengungkapan ESG tinggi menunjukkan perilaku kepatuhan pajak yang lebih baik. Sebuah perusahaan dapat memanfaatkan program CSR sebanyak mungkin sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak mereka, karena

dalam penerapan program tersebut memerlukan biaya yang akan mengurangi laba perusahaan. Beberapa studi menemukan bahwa ESG *disclosure* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, karena dengan melakukan hal baik, perusahaan merasa aman untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif (Abdelfattah & Aboud, 2020). Namun, studi lain menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dapat membantu mengurangi agresivitas pajak karena perusahaan lebih transparan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana ESG disclosure benar-benar berdampak dalam menekan tax aggressiveness, khususnya pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI di Indonesia.

Selain itu, agresivitas pajak perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh *capital intensity*. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki lebih banyak aset tetap, dimana menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi perpajakan melalui depresiasi aset. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI umumnya bukan perusahaan kecil, sehingga memiliki struktur aset tetap yang kompleks, seperti pabrik, mesin, dan properti. Tingkat *capital intensity* yang tinggi pada perusahaan besar menciptakan potensi bagi mereka untuk mengoptimalkan strategi perpajakan melalui depresiasi aset. Dalam penelitian Junensie et al. (2020) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, nilai suatu *capital intensity* atau kemampuan perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan rendah, maka kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Sementara itu, agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh *company size* perusahaan. *Company size* adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan masuk dalam kategori perusahaan besar atau kecil berdasarkan total aset, omzet, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan dengan ukuran besar lebih cenderung melakukan agresivitas pajak karena memiliki lebih banyak sumber daya untuk menyusun strategi pajak yang kompleks dan memanfaatkan celah regulasi. Dalam penelitian Widiana et al. (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Teori keagenan (*agency theory*) adalah konsep yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer perusahaan). Pihak manajer cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi seperti mengutamakan laba perusahaan dengan bersifat agresif terhadap pajaknya, sehingga pihak manajer dapat meningkatkan reputasinya terhadap pemegang saham yang lebih fokus pada peningkatan nilai perusahaan dengan tetap patuh pada regulasi perpajakan sehingga terjadi konflik keagenan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian dan pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Meskipun terdapat penelitian telah dilakukan terkait hubungan antara ESG, *capital intensity*, dan *company size* dengan *tax aggressiveness*, hasil yang diperoleh masih beragam dan inkonsisten.

Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan menganalisis hubungan antara ketiga variabel tersebut terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI di Indonesia dan menggunakan standar terbaru dalam pelaporan laporan

keberlanjutan, yaitu *Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **Pengaruh Pengungkapan ESG, *Capital Intensity*, dan *Company Size* terhadap *Tax Aggressiveness* pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama:

1. Bagaimana pengaruh pengungkapan ESG terhadap *tax aggressiveness*?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax aggressiveness*?
3. Bagaimana pengaruh *company size* terhadap *tax aggressiveness*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengungkapan ESG terhadap *tax aggressiveness*.
2. Mengidentifikasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax aggressiveness*.
3. Menganalisis hubungan *company size* terhadap *tax aggressiveness*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam literatur akademik mengenai pengaruh pengungkapan ESG, *capital intensity*, dan *company size* terhadap *tax aggressiveness*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam memahami agresivitas pajak dalam konteks perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat teori keagenan dalam menjelaskan bagaimana mekanisme transparansi dan tata kelola perusahaan dapat berperan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya terkait analisis pengaruh ESG, *capital intensity*, dan *company size* terhadap *tax aggressiveness*. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman praktis dalam menyusun karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik.

### b. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya transparansi dalam pengungkapan ESG sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari risiko regulasi di masa depan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu perusahaan memahami bagaimana *capital intensity* dan *company size* dapat mempengaruhi

strategi pajak mereka, sehingga dapat menyusun kebijakan pajak yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori (Teori Keagenan)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak *principal* dan *agent* dalam pengelolaan perusahaan. Pada teori ini, pihak *principal* mengarah pada investor/pemilik saham, sementara pihak *agent* adalah manajemen perusahaan yang mengorganisasikan perusahaan. *Principal* menyediakan sumber daya beserta infrastruktur yang diperlukan untuk keberlangsungan perusahaan, sedangkan *agent* bertanggung jawab mengelola tugas yang telah didelegasikan oleh pihak *principal*. Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan ini dapat menimbulkan konflik keagenan karena perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Agen cenderung memaksimalkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan prinsipal. Selain itu, konflik keagenan dapat memperburuk karena adanya asimetri informasi, dimana manajemen lebih memiliki informasi yang lebih lengkap terhadap data keuangan dan celah perpajakan dibanding pemegang saham.

Teori ini menjelaskan bahwa pihak prinsipal berupaya memaksimalkan penerimaan dengan tetap patuh pada regulasi perpajakan, sedangkan agen berupaya meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayar agar dapat memaksimalkan laba mereka. Armstrong et al. (2015) menyatakan sebuah manajemen dapat bersifat agresif terhadap praktik pajak mereka untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, yang dapat menguntungkan mereka secara pribadi tetapi merugikan pemegang saham.

Pemegang saham mengharapkan manajemen menggunakan kewenangannya secara optimal untuk kepentingan perusahaan, namun dalam praktiknya sering terjadi *misalignment of interest*. Manajemen sebagai pihak insider memiliki akses informasi yang lebih komprehensif tentang operasional perusahaan, termasuk strategi perpajakan, dibandingkan pemegang saham sebagai outsider. Kondisi ini tidak hanya dapat menimbulkan konflik keagenan, tetapi juga menghasilkan *agency cost* berupa pengawasan ekstra, biaya monitoring, dan potensi kerugian akibat keputusan yang tidak optimal. *Agency cost* dapat mengarah kepada bentuk denda pajak, penurunan reputasi perusahaan, atau hilangnya kepercayaan investor ketika praktik agresif terungkap.

## 2.2 *Tax Aggressiveness*

*Tax aggressiveness* merujuk kepada tindakan individu ataupun perusahaan dalam memaksimalkan peluang untuk mengurangi beban pajak yang mereka tanggung secara agresif. *Tax aggressiveness* mencakup praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah hukum hingga penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum. Umumnya, perusahaan terdorong untuk melakukan *tax aggressiveness* karena ingin meningkatkan laba bersih untuk pengembangan usaha ataupun karena terdapat tekanan dari pihak principal kepada pihak agent untuk meningkatkan laba ataupun insentif manajerial.

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat *tax aggressiveness* pada perusahaan karakteristik perusahaan, seperti ukuran, profitabilitas, leverage, dan struktur kepemilikan. Perusahaan besar dengan struktur bisnis yang kompleks cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan praktik agresivitas

pajak melalui rekayasa laporan keuangan dan transaksi lintas negara. Selain itu, tekanan dari pemegang saham atau pemilik modal untuk mencapai target keuntungan tertentu juga dapat menjadi pendorong bagi manajemen untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Lingkungan regulasi dan efektivitas pengawasan dari otoritas pajak juga turut memengaruhi sejauh mana perusahaan merasa leluasa dalam menerapkan strategi perpajakan agresif.

Menurut Benkraiem et al. (2021), *tax aggressiveness* sering kali dikaitkan dengan risiko keuangan dan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang terlibat dalam agresivitas pajak cenderung mengalami pengawasan yang lebih ketat dari regulator serta mengalami dampak negatif terhadap kepercayaan *investor*. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai mempertimbangkan faktor tata kelola yang lebih baik dalam mengelola strategi perpajakan mereka.

### **2.3 Pengungkapan ESG**

Pengungkapan ESG mencerminkan transparansi perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan ESG dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen terhadap ESG ini dipandang mampu membentuk citra positif dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang tinggi cenderung memiliki praktik perpajakan yang lebih bertanggung jawab, karena adanya tekanan dari publik dan regulator untuk meningkatkan transparansi.

ESG diungkapkan dalam laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan dalam upaya menunjukkan kinerja dan komitmen mereka terhadap aspek lingkungan sosial, dan tata kelola. Dalam menyusun laporan keberlanjutan, perusahaan memiliki suatu standar sebagai pedoman dalam menyusunnya, salah satunya yaitu standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Standar GRI merupakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang bersifat global, standar ini menyajikan struktur pengungkapan berdasarkan material, dengan kategori utama yang mencakup aspek lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*).

Pada akhir tahun 2021, GRI memiliki standar terbaru yaitu *GRI Standards 2021*, memperkenalkan beberapa perubahan signifikan dan menyederhanakan indikator-indikatornya jika dibanding versi GRI 2016, mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam menyampaikan kontribusinya terhadap pembangunan keberlanjutan (GRI, 2025). Penerapan pedoman Standar GRI 2021 mulai berlaku pada 1 Januari 2023, standar GRI 2021 terdiri dari:

a. Standar universal

Standar yang dimana berlaku untuk semua perusahaan, meliputi: GRI 1 mengenai landasan baru, GRI 2 mengenai pengungkapan umum, dan GRI 3 mengenai pengungkapan topik material.

b. Standar sektor

Terdiri dari 40 standar yang berlaku untuk sektor tertentu. Perusahaan melaporkan semua informasi yang relevan tentang topik tertentu atau dapat memberikan alasan untuk tidak mengungkapkannya. Saat ini, standar sektor

telah dirilis untuk beberapa sektor seperti sektor minyak dan gas (GRI 11), sektor batubara (GRI 12), dan pertanian, akuakultur, dan perikanan (GRI 13). Sektor pertambangan juga mempunyai standar sektor sendiri yaitu GRI 14, yang akan diwajibkan pada 1 Januari 2026.

c. Standar topik

Standar yang terdiri dari 31 topik. Standar ini menghapus 3 topik dari standar GRI 2016, yaitu pada GRI 307 (kepatuhan lingkungan), GRI 412 (penilaian HAM), dan GRI 419 (kepatuhan sosial ekonomi). Perusahaan harus melaporkan semua informasi yang relevan tentang topik tertentu atau dapat memberikan alasan jika tidak mengungkapkannya.

Pengungkapan ESG belum sepenuhnya bersifat wajib, di Indonesia sudah terdapat beberapa ketentuan yang mewajibkan penyampaian laporan terkait tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan bagian dari aspek ESG. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang mengatur kewajiban perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) oleh perusahaan. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup aspek ESG. Dengan demikian, meskipun ESG *disclosure* secara umum sering dianggap sebagai praktik sukarela (*voluntary*), di Indonesia sudah terdapat kerangka regulasi yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong atau mewajibkan pengungkapan informasi terkait ESG.

Pengungkapan ESG tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun citra positif dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Yoon Bohyun (2021) menyatakan Perusahaan dengan komitmen ESG tinggi cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak untuk mempertahankan citra positif perusahaan. Namun, temuan Abdelfattah & Aboud (2020) menunjukkan bahwa adanya korelasi antara penghindaran pajak dengan program CSR. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung meningkatkan pengungkapan aktivitas CSR mereka untuk membangun citra positif terkait perilaku etis pada publik dan memperbaiki reputasi perusahaan pada media. Dengan demikian, meskipun pengungkapan ESG sering dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas, hubungannya dengan *tax aggressiveness* tetap kompleks dan bergantung pada motivasi di balik pengungkapan tersebut.

#### **2.4 *Capital Intensity***

Sebuah perusahaan bersedia mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung kegiatan operasional serta pembiayaan aset dengan tujuan utama memperoleh keuntungan (Indradi, 2018). *Capital intensity* mengacu pada besarnya aset tetap dalam total aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan efisiensi pajak melalui depresiasi aset tetap. Selain itu, perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar lebih mungkin untuk memanfaatkan kebijakan akuntansi tertentu yang dapat mengurangi beban pajak mereka secara legal (Rego & Wilson, 2017). Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan

tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki kewajiban pajak yang lebih besar karena mereka kurang fleksibel dalam melakukan perencanaan pajak agresif.

Pihak manajemen perusahaan memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan investasi yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat terjadi konflik keagenan bagi pihak manajemen dan pemegang saham. Hubungan antara *capital intensity* dan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh sektor industri. Perusahaan di sektor manufaktur yang memiliki tingkat *capital intensity* tinggi lebih cenderung melakukan perencanaan pajak berbasis aset, sedangkan perusahaan di sektor jasa dengan *capital intensity* yang rendah lebih bergantung pada strategi penghindaran pajak lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perbedaan sektor dalam menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax aggressiveness*.

## **2.5 *Company Size***

*Company size* merupakan pengelompokan identitas berdasarkan skala besar kecilnya perusahaan. Secara umum, untuk mengukur besaran skala perusahaan adalah dengan melihat total aset, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan, serta nilai pasar saham perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dikelompokkan atas tiga tingkatan kategori yang berbeda diantaranya perusahaan dengan skala besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan ukuran perusahaannya dalam berbagai keputusan bisnis, Perusahaan dengan skala besar seringkali lebih mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah, sehingga memungkinkan mereka berlaku patuh terhadap semua regulasi dan ketentuan yang berlaku sehingga memungkinkan untuk tidak melakukan tindakan menghindari pajak (*tax avoidance*). Kinerja perusahaan yang

baik dan telah stabil mencerminkan perusahaan telah mampu melaksanakan aktivitas ekonominya secara efektif.

Dyrend et al. (2018) menyatakan perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih kompleks dan agresif. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan besar juga lebih transparan dalam pelaporan keuangan mereka dan lebih mendapat tekanan dari regulator serta pemangku kepentingan untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax aggressiveness* masih menjadi perdebatan dalam literatur akademik. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi tingkat pengawasan yang diterima oleh otoritas pajak. Menurut Slemrod (2019), perusahaan besar lebih cenderung diaudit oleh otoritas pajak dibandingkan perusahaan kecil, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi agresivitas pajak. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki lebih banyak akses terhadap sumber daya keuangan dan konsultan perpajakan yang dapat membantu mereka menemukan celah dalam regulasi pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Khikmatul Khusna, Hendi Subandi, 2025.	<i>ESG DISCLOSURE, RELATED PARTY TRANSACTIONS, AND EXECUTIVE CHARACTERISTICS ON TAX AVOIDANCE</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>ESG Disclosure (X<sub>1</sub>)</i></li> <li>2. <i>Related Party Transaction (X<sub>2</sub>)</i></li> <li>3. <i>Executive Characteristics (X<sub>3</sub>)</i></li> <li>4. <i>Tax Avoidance (Y)</i></li> </ol>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan transaksi dengan pihak berelasi memiliki pengaruh positif. Karakteristik eksekutif tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Ruly Alifah Wardani, Wahyu Nurul Hidayati, 2025	PENGARUH ESG, <i>CAPITAL INTENSITY</i> DAN <i>THIN CAPITALIZATION</i> TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESG (X<sub>1</sub>)</li> <li>2. <i>Capital Intensity (X<sub>2</sub>)</i></li> <li>3. <i>Thin Capitalization (X<sub>3</sub>)</i></li> <li>4. Agresivitas Pajak (Y)</li> </ol>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara ESG, <i>capital intensity</i> , dan <i>thin capitalization</i> terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ-45 tahun 2018-2022.
3.	Priandhita Sukowidyanti Asmoro, Suresh Ramakrishnan, Sifa Arsyanda, Nurlita Sukma Alfandia, Devi Nur Cahaya Ningsih, Dewi Noor Fatikhah Rokhimakhum ullah & Kadarisman Hidayat, 2024.	<i>ESG disclosure, governance, political connection, and tax Aggressiveness: what information is critical, and is more information always forceful?</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>ESG Disclosure (X<sub>1</sub>)</i></li> <li>2. <i>Political Connection (X<sub>2</sub>)</i></li> <li>3. <i>Governance (X<sub>3</sub>)</i></li> <li>4. <i>Tax Aggressiveness (Y)</i></li> </ol>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi skor GRI antara Indonesia dan Malaysia, dengan Malaysia umumnya memiliki skor yang lebih tinggi. Koneksi politik dan variabel tata kelola tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, pengungkapan informasi pajak dalam kerangka GRI 2019 terbukti positif dalam mengurangi TAG di Indonesia.

*Disambung ke halaman berikutnya*

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Feronika Oktiani, Aris Sanulika, 2024.	Implementasi Strategi Bisnis Dan Pengungkapan Esg Terhadap Tax avoidance	1. Pemasaran (X <sub>1</sub> ) 2. Kemampuan Perusahaan (X <sub>2</sub> ) 3. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan (X <sub>3</sub> ) 4. Intensitas Aset Tetap (X <sub>4</sub> ) 5. ESG (X <sub>5</sub> ) 6. Tax Avoidance (Y)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Pemasaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap <i>Tax avoidance</i> , (2) Kemampuan Perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap <i>Tax avoidance</i> , (3) Tingkat Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap <i>Tax avoidance</i> , (4) Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh secara parsial terhadap <i>Tax avoidance</i> , (5) ESG berpengaruh secara parsial terhadap <i>Tax avoidance</i>
5.	Etania Ermadiela Hanjani, Harti Budi Yanti, 2024	<i>THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURES AND COMPANY SIZE ON STOCK RETURNS</i>	1. Pengungkapan Lingkungan (X <sub>1</sub> ) 2. Pengungkapan Sosial (X <sub>2</sub> ) 3. Pengungkapan Tata Kelola (X <sub>3</sub> ) 4. Ukuran Perusahaan (X <sub>4</sub> ) 5. Profitabilitas (X <sub>5</sub> ) 6. Return Saham (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengungkapan lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>return</i> saham, (2) Pengungkapan sosial berpengaruh positif terhadap <i>return</i> saham, (3) Pengungkapan tata kelola berpengaruh positif terhadap <i>return</i> saham, (4) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>return</i> saham, (5) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham, (6) Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham.
6.	Heni Afiani Nisaakmala, Haryono Umar, 2024	Pengaruh Profitabilitas, <i>Sales Growth</i> , dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) Sebagai Moderasi	1. Profitabilitas (X <sub>1</sub> ) 2. <i>Sales Growth</i> (X <sub>2</sub> ) 3. Likuiditas (X <sub>3</sub> ) 4. Agresivitas Pajak (Y) 5. ESG (Z)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan likuiditas masing-masing memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. (2) Variabel ESG ditemukan tidak mampu memoderasi pengaruh negatif pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
7.	Ega Christy, Sofie, 2023	PENGARUH PENGUNGKAPAN <i>ENVIRONMENTAL, SOCIAL, DAN GOVERNANCE</i> TERHADAP NILAI PERUSAHAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengungkapan lingkungan (<math>X_1</math>)</li> <li>2. Pengungkapan sosial (<math>X_2</math>)</li> <li>3. Pengungkapan tata kelola (<math>X_3</math>)</li> <li>4. Nilai Perusahaan (<math>Y</math>)</li> </ol>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengungkapan lingkungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) Pengungkapan sosial perusahaan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, (3) Pengungkapan tata kelola terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan
8.	Delitha Magfira E.G, Murtanto, 2021.	PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris Independen (<math>X_1</math>)</li> <li>2. Komite Audit (<math>X_2</math>)</li> <li>3. Kepemilikan Institusional (<math>X_3</math>)</li> <li>4. Ukuran Perusahaan (<math>X_4</math>)</li> <li>5. Agresivitas Pajak (<math>Y</math>)</li> </ol>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. (2) Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (3) Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. (4) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. (5) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
9.	Bohyun Yoon, Jeong-Hwan Lee, and Jin-Hyung Cho, 2021	<i>The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance—Evidence from Korea</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESG (<math>X_1</math>)</li> <li>2. <i>Tax Avoidance</i> (<math>Y</math>)</li> </ol>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hubungan negatif antara skor ESG dan penghindaran pajak, (2) hubungan negatif yang lebih kuat antara skor ESG dan penghindaran pajak pada sampel afiliasi non-chaebol, dan (3) hubungan yang lebih signifikan antara skor social dan kecenderungan menghindari pajak.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
10.	Andi Ghazali, Zulmaita, 2020	Pengaruh Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengungkapan <i>Environmental</i> (<math>X_1</math>)</li> <li>2. Pengungkapan <i>Social</i> (<math>X_2</math>)</li> <li>3. Pengungkapan <i>Government</i> (<math>X_3</math>)</li> <li>4. Tingkat profitabilitas (<math>Y</math>)</li> </ol>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Pengungkapan <i>environmental</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, (2) Pengungkapan <i>Social</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas, (3) Pengungkapan <i>Government</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas, (4) Pengungkapan <i>Environmental, Social, dan Governance</i> (ESG) secara bersamaan atau simultan berpengaruh positif dalam level signifikansi rendah hingga moderat terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

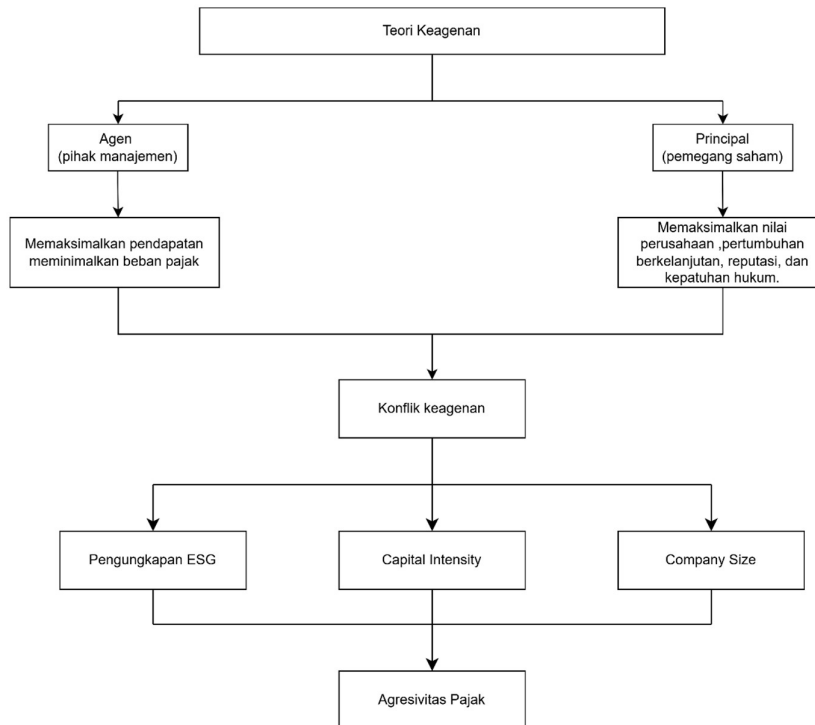
Sumber: Penelitian terdahulu, 2025

## 2.7 Kerangka Konseptual

Dalam teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat hubungan yang terjadi antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (pihak manajemen) dalam menjalani aktivitas perusahaan. *Principal* memberi kewenangan kepada pihak agen dalam pengambilan keputusan dan melakukan semua kegiatan, sehingga terdapat keunggulan di pihak *agent*. Manajer dapat memanfaatkan keuntungan tersebut untuk kepentingan pribadi, salah satunya memaksimalkan pendapatan dengan meminimalkan beban pajak perusahaan. Berbeda dengan pihak *principal* yang ingin memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengurangi risiko.

Hal tersebut yang memicu terjadinya konflik keagenan antara kedua pihak yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi pihak agen untuk bersifat agresif

terhadap beban pajaknya, diantaranya pengungkapan ESG, *capital intensity*, dan *company size*. Pada teori dan variabel yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

*Sumber: Diolah penulis, 2025*

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Pengungkapan ESG terhadap *Tax Aggressiveness*

Pengungkapan ESG merupakan komitmen perusahaan dalam praktik keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik. Pengungkapan ESG juga berfokus pada tata kelola perusahaan, seperti integritas, etika, transparansi, dan fungsi dewan direksi. Membayar pajak merupakan salah satu faktor penting dalam ESG, semakin tinggi nilai pengungkapan ESG sebuah

perusahaan, maka semakin kecil sebuah perusahaan untuk agresif terhadap pajak.

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara agen dan principal untuk mencapai tujuan mereka, salah satunya memaksimalkan keuntungan dan nilai perusahaan. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut, pihak agen dapat bersifat agresif untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan melakukan peningkatan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu penerapan ESG untuk menutupi penggunaan strategi penghindaran pajak (Abdelfattah & Aboud, 2020). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diketahui hipotesis untuk menguji penelitian sebagai berikut:

***H<sub>1</sub> : Pengungkapan ESG berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax aggressiveness***

### **2.8.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness***

*Capital intensity* mencerminkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan, maka semakin besar dorongan perusahaan untuk semakin agresif terhadap pajak. Hal tersebut muncul karena umur ekonomis aset tetap yang akan memunculkan beban depresiasi, sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mengurangi laba perusahaan. Apabila laba yang didapat perusahaan berkurang, maka akan berdampak juga terhadap beban pajak perusahaan yang akan semakin rendah.

Menurut teori keagenan, aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat menjadi penyebab dari agresivitas pajak karena adanya pemanfaatan beban depresiasi yang bisa saja dilakukan oleh pihak agen. Penelitian sebelumnya oleh Ananta et al.

(2025) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan terdapat penelitian oleh Safitri (2024) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

***H<sub>2</sub> : Capital Intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax aggressiveness***

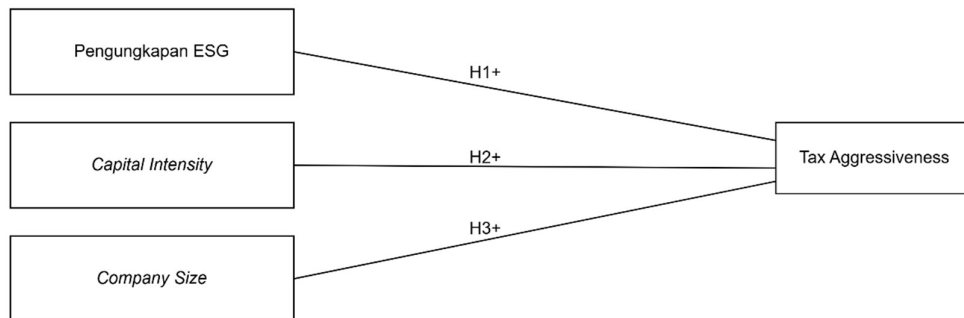
### **2.8.3 Pengaruh *Company Size* terhadap *Tax Aggressiveness***

*Company Size* merupakan indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan termasuk dalam perusahaan besar atau kecil, dengan menggunakan pengukuran seperti total aset, jumlah penjualan, nilai pasar saham, dan rata-rata tingkat penjualan (Apridinata & Zulvia, 2023). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula kompleksitas transaksi yang dijalankan, sehingga meningkatkan kemungkinan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif (Octavianingrum & Mildawati, 2018).

Berdasarkan dengan teori keagenan (*agency theory*), menyatakan bahwa manajer sebagai agen memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan pemilik, termasuk keputusan terkait pengelolaan pajak. Selain itu, perusahaan besar cenderung memiliki potensi laba yang lebih tinggi, yang berarti beban pajak yang lebih besar (Merslythalia & Lasmana, 2017). Penelitian sebelumnya oleh E.G & Murtanto (2021) dan Octavianingrum & Mildawati (2018) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

***H<sub>3</sub> : Company size berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax aggressiveness***

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

*Sumber: Diolah penulis, 2025*

## BAB III

### DEFINISI OPERASIONAL

#### 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

##### 3.1.1 Variabel Dependen (Y)

Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa variabel dependen, yang sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen, dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai variabel terikat. Variabel ini merupakan faktor yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tax aggressiveness.

##### 1. *Tax aggressiveness*

*Tax aggressiveness* mengukur sejauh mana perusahaan menjalankan strategi untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui metode yang sah ataupun agresif, yang dapat mempengaruhi kontribusi pajak terhadap negara. Praktik agresivitas pajak mencerminkan upaya perusahaan dalam merancang kebijakan perpajakan sedemikian rupa untuk menekan beban pajak serendah mungkin, sering kali dengan memanfaatkan celah dalam regulasi pajak. Tax aggressiveness dapat diukur dengan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi ETR,

maka tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah.

ETR dapat diukur dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Perusahaan SRI – KEHATI}}{\text{Laba Sebelum Pajak Perusahaan SRI – KEHATI}} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

*ETR (Effective Tax Rate)* merupakan rasio yang mengukur tingkat tax aggressiveness perusahaan .

Beban Pajak Penghasilan adalah jumlah pajak penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan.

Laba Sebelum Pajak adalah laba perusahaan sebelum dikurangi beban pajak penghasilan.

### 3.1.2 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2022), variabel independen, yang juga dikenal sebagai variabel stimulus, prediktor, atau antecedent, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel ini merupakan faktor yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau kemunculan variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Pengungkapan ESG

Pengungkapan *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) merupakan bentuk pelaporan yang menggambarkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pengungkapan ESG mengukur sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait aspek

lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam. Aspek lingkungan mencakup penggunaan sumber daya seperti energi dan air, serta dampak yang ditimbulkan seperti emisi gas, limbah, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Pengungkapan *environmental* ini dievaluasi menggunakan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 2021 dengan total 31 item pengungkapan. Pengungkapan *social* mencakup aspek kesejahteraan tenaga kerja, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, serta dampak sosial terhadap komunitas, dengan total 36 item pengungkapan. Sementara itu, pengungkapan *governance* berfokus pada praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manajemen, dengan total 13 item yang diukur (Rochmansyah et al., 2024). Skor pengungkapan ESG didukung dari membandingkan jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan dengan total item sesuai standar GRI, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ESG = \frac{\text{Sum of company's disclosure item}}{\text{Total of GRI's disclosure standard item}} \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

*ESG* adalah skor yang mengukur sejauh mana perusahaan memenuhi standar pengungkapan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

*Sum of company's disclosure item* merupakan jumlah item ESG yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keberlanjutannya

*Total of GRI's disclosure standard item* adalah total item pengungkapan menurut GRI, sebagai acuan pelaporan keberlanjutan

## 2. *Capital Intensity*

*Capital intensity* mengukur seberapa besar proporsi aset tetap yang digunakan perusahaan dalam struktur asetnya. Indikator ini mencerminkan investasi jangka panjang perusahaan dalam aset berwujud yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. *Capital intensity* juga dikaitkan dengan potensi penghematan pajak melalui depresiasi aset tetap. Perusahaan dengan nilai aset tetap tinggi cenderung memiliki fleksibilitas dalam pengaturan beban pajaknya. *Capital intensity* dapat diukur dengan menggunakan rumus *capital intensity ratio* (CAPIN) sebagai berikut:

$$CAPIN = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan:

*CAPIN* (*capital intensity rasio*) merupakan rasio yang mengukur proporsi aset tetap bersih terhadap total aset perusahaan

Total Aset Tetap Bersih adalah nilai aset tetap (seperti properti, pabrik, dan peralatan) setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Total Aset Seluruh merupakan nilai aset yang dimiliki perusahaan, baik aset lancar maupun tidak lancar.

## 3. *Company Size*

*Company size* mengukur besar kecilnya skala perusahaan berdasarkan total aset, pendapatan, atau kapitalisasi pasarnya. Ukuran perusahaan menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi kemampuan perusahaan untuk

melakukan efisiensi operasional dan strategi perpajakan. Tingginya tingkat laba kena pajak suatu perusahaan akan memengaruhi perusahaan tersebut untuk bertindak agresif dalam mengurangi beban pajak. Metode yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$Size = Ln Total Assets \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan:

*Size* adalah ukuran perusahaan yang dihitung berdasarkan nilai total aset perusahaan

*Ln Total Assets* merupakan logaritma natural dari total aset perusahaan, baik aset lancar maupun tidak lancar

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yang terideks dalam SRI-KEHATI selama periode 2022-2024. Indeks SRI-KEHATI merupakan indeks saham yang mengukur kinerja perusahaan-perusahaan terbuka di BEI yang memenuhi kriteria *sustainable* dan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara konsisten. Indeks ini adalah hasil dari kolaborasi antara BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), dengan tujuan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Alasan mengambil perusahaan yang terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI adalah karena perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks tersebut adalah perusahaan tercatat yang

memiliki kinerja yang baik dalam hal keberlanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

### 3.2.2 Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia, pernah terindeks dalam SRI-KEHATI selama tahun 2022-2024.
2. Perusahaan aktif memublikasikan laporan keberlanjutan secara konsisten di tahun 2022-2024 dan menggunakan standar GRI 21.
3. Perusahaan tidak menggunakan standar sektor GRI 2021 dalam pelaporan laporan keberlanjutan.

**Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia, pernah terindeks dalam SRI-KEHATI selama tahun 2022-2024.	40
2	Perusahaan yang tidak aktif memublikasikan laporan keberlanjutan secara konsisten di tahun 2022-2024 dan menggunakan standar GRI 21.	(2)
3	Perusahaan yang menggunakan standar sektor GRI 2021 dalam pelaporan laporan keberlanjutan.	(5)
Total sampel perusahaan		33
Jumlah tahun penelitian		3
Total data pengamatan		99

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan adalah jenis data kuantitatif, dimana dalam penelitian ini akan diperoleh dalam bentuk angka-angka. Sedangkan data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan

dan laporan keberlanjutan yang telah dipublis pada website perusahaan dan situs resmi BEI di laman *www.idx.com*.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengkaji informasi terkait variabel penelitian pada berbagai referensi seperti literatur, jurnal, penelitian terdahulu, artikel, hingga media tertulis lainnya. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara meneliti dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data dari *audited annual report* dan *audited sustainability report* yang telah dipublish di *website* resmi perusahaan.

### **3.5 Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu kombinasi antara data runtut waktu (*time-series*) dan data silang (*cross section*). Data time series ditunjukkan pada data yang dikumpulkan dari beberapa periode waktu, sedangkan data cross section ditunjukkan oleh pengamatan terhadap beberapa perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *software Eviews* versi 12 untuk menguji dan menerapkan metode analisis yang digunakan.

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan teknik dasar dalam statistik yang digunakan untuk menyajikan dan meringkas data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Tujuan utamanya adalah menggambarkan ciri-ciri umum dari data penelitian yang

telah dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi (Sugiyono, 2020). Dalam konteks penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik data dari masing-masing variabel seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Informasi ini berguna untuk memperoleh gambaran awal tentang distribusi dan kecenderungan data dari perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian.

### 3.5.2 Model Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat tiga pendekatan yang dilakukan dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

#### 1. *Common Effect Model (CEM)*

Merupakan model pendekatan data panel yang paling sederhana karena hanya perlu mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dalam model ini, tidak ada perhatian khusus pada dimensi waktu dan individu, sehingga mengasumsikan perilaku data entitas sama dalam beberapa kurun waktu yang berbeda.

#### 2. *Fixed Effect Model (FEM)*

*Fixed Effect Model* berasumsi bahwa adanya perbedaan karakteristik dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Dalam mengestimasi data panel dengan *Fixed Effect Model*, diperlukan variabel dummy untuk mengangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Penggunaan *FEM* berasumsi koefisien regresi tetap antar perusahaan maupun waktunya.

### 3. *Random Effect Model (REM)*

*Random Effect Model* digunakan untuk mengestimasi data panel berupa variabel gangguan bisa saja saling berhubungan antar waktu dan individu. Dalam model ini, perbedaan intersep diatasi oleh error terms dari masing-masing perusahaan. Model ini memiliki kelebihan yang dapat menghilangkan heteroskedastisitas dalam data panel. *REM* juga dapat dikenal dengan teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

#### 3.5.3 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Setelah memperkirakan model regresi yang paling tepat dalam menggunakan tiga model di atas, harus menentukan teknik yang tepat untuk regresi data panel. Uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk mengevaluasi perbandingan antara *FEM* dengan *CEM*. Uji didasari pada signifikansi perbedaan intersep antar unit dalam model.

- a. Jika nilai probabilitas uji F dan *Chi-square*  $> 0,05$ , maka uji regresi data panel menggunakan *CEM*
- b. Jika nilai probabilitas uji F dan *Chi-square*  $< 0,05$ , maka uji regresi data panel menggunakan *FEM*

##### 2. Uji Hausman

Uji Hausman dapat digunakan untuk menilai model yang terbaik dan yang akan digunakan antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*, yang didasari oleh nilai p-value dari distribusi statistik *chi-square*

- a. Apabila nilai *p-value* yang dimiliki  $> 0,05$  maka model yang akan digunakan adalah *REM*
  - b. Apabila nilai *p-value* yang dimiliki  $< 0,05$  maka model yang akan digunakan adalah *FEM*
3. Uji *Langrange Multiplier (LM)*

Uji *Langrange Multiplier* dilakukan dalam menentukan model mana yang lebih baik untuk digunakan untuk regresi data panel antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Namun, jika pada saat melakukan uji Hausman yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*, maka uji *LM* tidak perlu dilakukan.

- a. Jika nilai *probability*  $> 0,05$ , maka model yang digunakan untuk uji regresi panel data adalah *Common Effect Model*
- b. Jika nilai *probability*  $< 0,05$ , maka model yang digunakan untuk uji regresi panel data adalah *Random Effect Model*

#### **3.5.4 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi pada penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil model regresi telah memenuhi syarat-syarat sehingga hasil estimasinya dapat dipercaya. Uji ini dapat mendeteksi adanya kemungkinan gejala yang dapat mengganggu nilai dari keakuratan data. Menurut Ghozali (2018), untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian asumsi klasik mulai dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Jika variabel tidak berdistribusi normal, maka akurasi hasil uji statistik akan berkurang. Untuk mendeteksi hal tersebut, uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera*. Kriteria untuk pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera*  $> 0,05$ , maka data berdistribusi normal
- b. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera*  $< 0,05$ , maka data tidak terdistribusi dengan normal

### 2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel-variabel independen dalam sebuah model regresi. Dasar kriteria untuk pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai korelasi  $> 0,80$  maka ada masalah multikolinieritas
- b. Jika nilai korelasi  $< 0,80$  maka tidak ada masalah multikolinieritas

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), heteroskedastisitas mengacu pada kondisi dimana varians error tidak stabil. Uji ini bertujuan mendeteksi adanya ketidakkonsistenan varians residual antar observasi dalam model regresi. Penelitian ini menerapkan uji *Glejser* dengan meregresikan nilai absolut

residual terhadap variabel independen. Pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$   $H_0$  diterima, artinya terdapat heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$   $H_0$  ditolak, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena gangguan (residual) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*) yang mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada variabel lag dia antara variabel independen (Ghozali, 2018). Langkah awal melakukan uji *Durbin-Watson* adalah merumuskan hipotesis. Pengambilan keputusan bahwa terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Dasar Pengambilan Keputusan Uji *Durbin-Watson***

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$d_L \leq d < d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_U < d < 4 - d_U$

Sumber: Ghozali (2018)

### 3.5.5 Uji F

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara bersamaan (simultan) dari seluruh variabel independen dalam model terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung terhadap F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila F hitung lebih besar F tabel atau probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan ( $\text{Sig} \leq 0,05$ ), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila F hitung lebih kecil dari nilai F tabel atau probabilitas lebih besar dari nilai signifikan ( $\text{Sig} \geq 0,05$ ), maka hipotesis tidak dapat diterima, ini berarti secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.5.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1 (Ghozali, 2021). Nilai  $R^2$  yang dikalikan dengan 100% menunjukkan persentase kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen dalam model regresi. Menurut Ghozali (2021), semakin tinggi nilai  $R^2$  (mendekati 1), semakin baik kemampuan variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen, yang mengindikasikan kualitas model regresi yang kuat. Sebaliknya, nilai  $R^2$  yang rendah (mendekati 0) menandakan bahwa

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat terbatas atau lemah. Dengan demikian, koefisien determinasi menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu model regresi.

### 3.5.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Ghozali (2018) menyatakan uji ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, tax aggressiveness berperan sebagai variabel dependen, sementara pengungkapan *environmental*, pengungkapan *social*, pengungkapan *government*, *capital intensity*, dan *company size* berfungsi sebagai variabel independen. Berdasarkan hubungan antara variabel di atas, maka untuk menganalisis permasalahan adalah regresi liner berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (3.5)$$

Sehingga, didapat persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 ESG_1 + \beta_2 CAPIN_2 + \beta_3 SIZE_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

$\alpha$  (konstanta) adalah nilai yang menunjukkan *intercept* atau titik potong regresi

dengan sumbu y saat semua variabel independen bernilai nol

ETR merupakan rasio yang mengukur persentase beban pajak terhadap laba

sebelum pajak

$\beta_1 - \beta_3$  (Koefisien regresi) dianggap sebagai nilai yang menunjukkan besarnya

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel

dependen

ESG<sub>1</sub> adalah skor gabungan yang mencerminkan tingkat pengungkapan informasi environmental, social, dan governance oleh perusahaan

CAPIN<sub>2</sub> merupakan rasio antara aset tetap bersih terhadap total aset, mencerminkan intensitas penggunaan aset tetap dalam operasi perusahaan

SIZE<sub>3</sub> merupakan rasio dalam mengukur ukuran perusahaan dengan logaritma natural dari total aset perusahaan

$\varepsilon$  (*error term*) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kesalahan model regresi atau pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan

### 3.5.8 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen seperti Kinerja Lingkungan, Intellectual Capital, dan Struktur Modal diuji kontribusinya terhadap Kinerja Perusahaan. Berdasarkan Ghozali (2018), pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Kriteria pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika nilai probabilitas/signifikansi  $\leq 0,05$ , berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis diterima.
- b. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , berarti tidak ada pengaruh signifikan, dan hipotesis ditolak. Dengan demikian, uji ini membantu menentukan apakah suatu variabel secara parsial memberikan kontribusi bermakna atau tidak terhadap model.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100304>
- Anggraeni, D. Y., & Djakman, C. D. (2017). Slack Resources, Feminisme Dewan, Dan Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 94–118. <https://doi.org/10.21002/Jaki.2017.06>
- Apridinata, E., & Zulvia, D. (2023). *Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, And Tax Avoidance. *Journal Of Accounting And Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/J.Jacceco.2015.02.003>
- Benkraiem, R., Uyar, A., Kilic, M., & Schneider, F. (2021). Ethical behavior, auditing strength, and tax evasion: A worldwide perspective. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 43. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100380>
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory Csr And Sustainability Reporting: Economic Analysis And Literature Review. *Review Of Accounting Studies*, 26(3), 1176–1248. <https://doi.org/10.1007/S11142-021-09609-5>
- Christy, E., & Sofie. (2023). Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Dan Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3899–3908. <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i2.18233>
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2018). *When Does Tax Avoidance Result In Tax Uncertainty?*
- E.G, D. M., & Murtanto, M. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/Jat.V8i1.8679>
- Faradina, F. (2025). *PMK 136/2024: Suar Keadilan dalam Pengaturan Pajak Minimum Global Lebih lanjut di: [https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global?utm_source=chatgpt.com)*. Pajak.Go.Id.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global?utm>

- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/Accr.2009.84.2.467>
- Ghazali, A., Studi Manajemen Keuangan, P., Negeri Jakarta, P., & Studi Manajemen Keuangan Politeknik Negeri Jakarta Jl GA Siwabessy, P. D. (2020). *Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal Of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Khoirunnissa, H. R., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018 – 2022). *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 219–236. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1192>
- Kubick, T. R., & Lockhart, G. B. (2017). Corporate Tax Aggressiveness And The Maturity Structure Of Debt. *Advances In Accounting*, 36, 50–57. <https://doi.org/10.1016/J.Adiac.2016.10.001>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated With Tax Avoidance? *Journal Of Business Ethics*, 127(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/S10551-014-2052-8>
- Meldisthy, F. F., Espa, V., & Ikhsan, S. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekobistek*, 13(2), 54–61. <https://doi.org/10.35134/Ekobistek.V13i2.783>
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 117. <https://doi.org/10.24843/Jiab.2016.V11.I02.P07>

- Mulpiani, W. (2019). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia. In *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 2).
- Octavianingrum, D., & Mildawati, T. (2018). *Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan komite audit terhadap agresivitas pajak*. In *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*
- Putri, R. (2024). *PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya*. <https://www.tempo.co>. <https://www.tempo.co/hukum/pt-antam-diduga-pernah-hindari-pajak-impor-emas-yang-didatangkan-dari-hong-kong-melalui-singapura-begini-modusnya-52735>
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities Of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/10.1506/Vann-B7ub-Gmfa-9e6w>
- Rochmansyah, a., farisa, a., putri, g. A., & bayhaki, m. R. (2024). *Pengaruh good corporate governance dan leverang terhadap integritas laporan keuangan*.
- Safitri, k. A., & muid, d. (2020). *Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, leverage, capital intensity dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2018)*.
- Slemrod, J. (2019). Tax Compliance And Enforcement. In *Journal Of Economic Literature* (Vol. 57, Issue 4, Pp. 904–954). American Economic Association. <https://doi.org/10.1257/Jel.20181437>
- Stickney, C. P., & Mcgee, V. E. (1982). Effective Corporate Tax Rates The Effect Of Size, Capital Intensity, Leverage, And Other Factors\*. In *Journal O F Accounting And Public Policy. I*.
- Widiana, D., & Jusuf, A. A. A. (2024). The Effect of Company Size, Profitability, Liquidity, Inventory Intensity, and Sales Growth on Tax Aggressiveness of Non-Cyclical Consumer Companies. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 3(8), 3391–3400. <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i8.10478>
- Yoon, B. H., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The Effect Of Esg Performance On Tax Avoidance—Evidence From Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/Su13126729>

**LAMPIRAN**

**Indikator Pengungkapan GRI Standard 2021.**

No.	Kategori	Indeks
<b>Aspek Environmental</b>		
1	GRI 301 : Material 2016	Pengungkapan 301-1 : Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
2		Pengungkapan 301-2: Material input dari daur ulang yang digunakan
3		Pengungkapan 301-3: Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
4	GRI 302: Energi 2016	Pengungkapan 302-1: Konsumsi Energi dalam Organisasi
5		Pengungkapan 302-2: Konsumsi Energi di Luar Organisasi
6		Pengungkapan 302-3: Intensitas Energi
7		Pengungkapan 302-4: Pengurangan Konsumsi Energi
8		Pengungkapan 302-5: Pengurangan pada Energi yang dibutuhkan Untuk Produk dan Jasa
9	GRI 303: Air dan Efluen 2018	Pengungkapan 303-1: Interaksi dengan Air sebagai Sumber Daya Bersama
10		Pengungkapan 303-2: Manajemen Dampak yang berkaitan dengan Pembuangan Air
11		Pengungkapan 303-3: Pengambilan Air
12		Pengungkapan 303-4: Pembuangan Air
13		Pengungkapan 303-5: Konsumsi Air
14	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	Pengungkapan 304-1: Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
15		Pengungkapan 304-2: Dampak Signifikan dari Aktivitas, Produk, dan Jasa pada Keanekaragaman Hayati
16		Pengungkapan 304-3: Habitat yang dilindungi atau
17		Pengungkapan 304-4: Spesies Daftar Merah IUCN dan Spesies daftar Konservasi Nasional dengan Habitat dalam Wilayah yang terkena Efek Operasi
18	GRI 305: Emisi 2016	Pengungkapan 305-1: Emisi GRK (Cakupan 1) Langsung
19		Pengungkapan 305-2: Emisi GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung
20		Pengungkapan 305-3: Emisi GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya
21		Pengungkapan 305-4: Intensitas Emisi GRK
22		Pengungkapan 305-5: Pengurangan Emisi GRK
23		Pengungkapan 305-6: Emisi Zat Perusak Ozon (ODS)
24		Pengungkapan 305-7: Nitrogen Oksida (Nox), Belerang Oksida (Sox), dan Emisi Udara Signifikan Lainnya
25	GRI 306: Limbah 2020	Pengungkapan 306-1: Timbulan Limbah dan Dampak Signifikan terkait Limbah
26		Pengungkapan 306-2: Manajemen Dampak Signifikan terkait Limbah
27		Pengungkapan 306-3: Timbulan Limbah
28		Pengungkapan 306-4: Limbah yang Dialihkan dari Pembuangan Akhir
29		Pengungkapan 306-5: Limbah yang Dikirimkan ke Pembuangan Akhir

30	GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016	Pengungkapan 308-1: Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
31		Pengungkapan 308-2: Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
<b>Aspek Social</b>		
1	GRI 401: Kepegawaian 2016	Pengungkapan 401-1: Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
2		Pengungkapan 401-2: Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu
3		Pengungkapan 401-3: Cuti melahirkan
4	GRI 402: Hubungan Tenaga	Pengungkapan 402-1: Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
5	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Pengungkapan 403-1: Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
6		Pengungkapan 403-2: Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
7		Pengungkapan 403-3: Layanan kesehatan kerja
8		Pengungkapan 403-4: Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja
9		Pengungkapan 403-5: Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
10		Pengungkapan 403-6: Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
11		Pengungkapan 403-7: Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
12		Pengungkapan 403-8: Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
13		Pengungkapan 403-9: Kecelakaan kerja
14		Pengungkapan 403-10: Penyakit Akibat Kerja
15	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	Pengungkapan 404-1: Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
16		Pengungkapan 404-2: Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
17		Pengungkapan 404-3: Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
18	GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016	Pengungkapan 405-1: Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
19		Pengungkapan 405-2: Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
20	GRI 406: Nondiskriminasi 2016	Pengungkapan 406-1: Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
21	GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	Pengungkapan 407-1: Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
22	GRI 408: Pekerja anak 2016	Pengungkapan 408-1: Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
23	GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	Pengungkapan 409-1: Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
24	GRI 410: Praktik Keamanan 2016	Pengungkapan 410-1: Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia

25	GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016	Pengungkapan 411-1: Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
26	GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	Pengungkapan 413-1: Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program
27		Pengungkapan 413-2: Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat
28	GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	Pengungkapan 414-1: Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
29		Pengungkapan 414-2: Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
30	GRI 415: Kebijakan Publik 2016	Pengungkapan 415-1: Kontribusi politik
31	GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	Pengungkapan 416-1: Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
32		Pengungkapan 416-2: Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
33	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	Pengungkapan 417-1: Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
34		Pengungkapan 417-2: Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
35		Pengungkapan 417-3: Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
36	GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	Pengungkapan 418-1: Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
<b>Aspek Government</b>		
1	GRI 2: Tata Kelola 2021	Pengungkapan 2-9: Struktur dan komposisi tata kelola
2		Pengungkapan 2-10: Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi
3		Pengungkapan 2-11: Ketua badan tata kelola tertinggi
4		Pengungkapan 2-12: Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak
5		Pengungkapan 2-13: Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak
6		Pengungkapan 2-14: Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
7		Pengungkapan 2-15: Konflik kepentingan
8		Pengungkapan 2-16: Komunikasi masalah penting
9		Pengungkapan 2-17: Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
10		Pengungkapan 2-18: Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
11		Pengungkapan 2-19: Kebijakan remunerasi
12		Pengungkapan 2-20: Proses untuk menentukan remunerasi
13		Pengungkapan 2-21: Rasio kompensasi total tahunan